



---

**PERAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM  
PENGELOLAAN ANGGARAN DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG**

**Indri Juliyanti<sup>1\*</sup>, Adam Zakaria<sup>2</sup>, Hera Khairunnisa<sup>3</sup>**  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the role of accountability and transparency in budget management at the Regional Secretariat of Sumedang Regency. A qualitative descriptive method was applied, with data collected through in-depth interviews and document analysis. NVivo 12 software was used to identify dominant themes and patterns in the data. Accountability is demonstrated through regular reporting—such as LKIP, LPPD, and LKPJ—and supervision by the Inspectorate and Regional House of Representatives (DPRD). Transparency is reflected in the open disclosure of budget information and the use of digital systems like SIPD. However, challenges remain, including limited human resources, delays in reporting, and underutilization of public information platforms. The study recommends strengthening information systems and enhancing personnel capacity.*

**Keywords:** *Accountability, Transparency, Budget Management, Public Sector, Local Government*

**How to Cite:**

Juliyanti, I., Zakaria, A., & Khairunnisa, H., (2025). Peran Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, Vol. 6, No. 2 hal 375-386.

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah menghadapi tuntutan untuk bersikap lebih terbuka dan responsif dalam proses perencanaan anggaran seiring meningkatnya dorongan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Nasution (2013) dalam (Maolani, 2023) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kemampuan institusi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik, khususnya dana negara, melalui mekanisme yang menjamin kesesuaian antara pelaksanaan penggunaan sumber daya tersebut dengan regulasi yang berlaku dan tujuan yang telah dirumuskan secara resmi. Akuntabilitas adalah proses dan hasil dari suatu kegiatan yang wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya transparansi, yang berperan sebagai sistem pengawasan guna mencegah terjadinya penyimpangan, seperti praktik korupsi di lembaga pemerintahan (Sudrajat, 2021).

Dalam konteks pemerintah daerah, akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan secara rutin, tetapi juga mencakup tanggung jawab secara moral dan administratif dalam pengelolaan anggaran. Melalui penerapan sistem akuntabilitas yang efektif, seluruh rangkaian proses, dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, sampai pelaporan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Pupuh S Wijaya, 2023).

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai unsur pelaksana administrasi dan pengelola anggaran, memegang peranan penting dalam mendukung fungsi koordinatif dan implementasi kebijakan anggaran. Upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi telah diwujudkan melalui penyusunan dokumen administratif yang mencakup tahapan perencanaan dan pelaporan seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), serta penggunaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Namun demikian, dalam praktiknya masih muncul berbagai kendala antara lain keterlambatan pelaporan, minimnya akses informasi kepada publik, dan rendahnya kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kelebihan pembayaran honorarium kepada panitia pengadaan barang dan jasa menunjukkan lemahnya sistem pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, infrastruktur teknologi informasi internal yang belum terkoordinasi sekaligus rendahnya keterlibatan publik dalam tahapan pengawasan turut menjadi tantangan dalam penerapan prinsip transparansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Naufal et al., (2024) meneliti terkait pelaksanaan sistem pertanggungjawaban dalam proses penyusunan laporan kinerja keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa penerapan sistem akuntabilitas telah berdampak besar memperbaiki penyusunan laporan keuangan kinerja yang dilakukan secara terbuka dan tepat. Namun, terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan sistem pertanggungjawaban dalam penyusunan laporan keuangan antara lain minimnya personel dengan kompetensi khusus dalam pengelolaan akuntabilitas keuangan, khususnya terkait ketepatan waktu dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan yang masih terhambat oleh rendahnya kualitas infrastruktur teknologi..

Kabupaten Sumedang menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kebutuhan masyarakat yang beragam, dan tuntutan untuk menghasilkan hasil optimal dari setiap pengeluaran. Selain itu, Kabupaten Sumedang juga dikenal sebagai salah satu daerah yang aktif berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan nilai-nilai akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menjadi objek yang sesuai dengan peran akuntabilitas dalam transparansi pengelolaan anggarannya.

Dengan latar belakang tersebut, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan praktik akuntabilitas dan transparansi sehingga dapat dihasilkan pengelolaan anggaran yang lebih baik dan lebih sesuai di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

Penelitian ini tidak hanya menambah literatur tentang pengelolaan keuangan publik di Indonesia tetapi juga akan memberikan wawasan yang bermanfaat untuk pemerintah daerah dalam upaya mengoptimalkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, diharapkan temuan ini akan menjadi referensi bagi pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di Kabupaten Sumedang dan daerah lainnya.

## TINJAUAN TEORI

### Akuntabilitas

Akuntabilitas didefinisikan oleh kamus besar akuntansi (2000:7) dalam (Setyowati et al., 2021) sebagai peran dan fungsi personal maupun divisi atau unit kerja dalam menjalankan fungsi tertentu. Akuntabilitas dapat diterapkan maupun dirumuskan berdasarkan pedoman hukum. Berdasarkan pendapat Mardiasmo (2018) Akuntabilitas publik merupakan tanggung jawab pihak yang diberikan amanah (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, menyajikan, serta menjelaskan seluruh kegiatan yang menjadi kewenangannya kepada pihak yang memberikan amanah (*principal*), yang berhak serta berwenang untuk meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas tersebut.

Akuntabilitas publik terbagi menjadi dua jenis yaitu: (1) akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan (2) akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal menggambarkan kewajiban untuk bertanggungjawab kepada penggunaan anggaran kepada pihak otoritas yang lebih atas. Akuntabilitas horizontal adalah penyampaian tanggung jawab kepada masyarakat luas (Mardiasmo, 2018).

BAPPENAS menetapkan indikator akuntabilitas meliputi keselarasan antara pelaksanaan program dan pedoman atau dengan standar operasional prosedur (SOP), keberadaan sanksi atas penyimpangan, serta *output* dan *outcome* yang terukur (QAK & HOLIFAH, 2024). Akuntabilitas publik dapat dibedakan menjadi akuntabilitas vertikal (kepada atasan atau lembaga pengawas) dan horizontal (kepada masyarakat luas) (Mardiasmo, 2018).

### Transparansi

Menurut Mardiasmo (2018), Transparansi dalam sektor publik berarti memastikan setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan mendapatkan informasi terkait pelaksanaan fungsi pemerintahan, termasuk peraturan, alur perumusannya, implementasinya dan pencapaian yang diperoleh. Transparansi ditunjukkan melalui keterbukaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran, serta adanya saluran komunikasi yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan dan pengawasan.

BAPPENAS menetapkan indikator transparansi meliputi ketersediaan informasi publik, kemudahan akses terhadap data, serta penggunaan media resmi untuk menyampaikan informasi kebijakan dan keuangan daerah (Dwi S et al., 2020).

Sebagai wujud transparansi dalam pengelolaan anggaran, Sekretariat Daerah menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 tentang sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah, yang mewajibkan setiap perangkat daerah untuk menggunakan sistem informasi keuangan yang terintegritas. Melalui SIPD, seluruh proses anggaran mulai dari perencanaan hingga pelaporan tercatat secara digital, tersistem serta terdokumentasi dengan baik. Kondisi ini memungkinkan data keuangan lebih mudah diakses, ditelusuri, serta diawasi oleh pihak internal seperti Inspektorat maupun eksternal seperti BPK.

### Pengelolaan Anggaran

Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020, pengelolaan anggaran daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Kelima tahapan tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Kegagalan dalam salah satu tahapan dapat mempengaruhi kualitas tata kelola keuangan secara keseluruhan. Secara

ringkas, pengelolaan ini meliputi:

- a. **Perencanaan dan Penganggaran**  
Pemerintah daerah berkewajiban menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat beserta sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan melalui dokumen perencanaan strategis.
- b. **Pelaksanaan Anggaran**  
Seluruh kegiatan pemerintahan dan program pembangunan harus dijalankan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disahkan, guna menjamin penggunaan dana publik secara efektif dan efisien.
- c. **Penatausahaan Keuangan**  
Setiap transaksi keuangan daerah dicatat, dikelola dan dikendalikan secara tertib berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah.
- d. **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**  
Pemerintah daerah menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik serta sebagai bahan evaluasi bagi pemangku kepentingan.
- e. **Pembinaan dan Pengawasan**  
Dilaksanakan oleh pihak pemerintah pusat guna memastikan bahwa seluruh tahapan pengelolaan keuangan pemerintah daerah mengacu pada aturan hukum yang berlaku, serta sebagai upaya dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel di tingkat daerah.

### **Sektor Publik**

Organisasi sektor publik merupakan lembaga yang berfokus pada pelayanan publik dan pengelolaan keuangan publik, seperti instansi pemerintahan dan lembaga nonlaba (Anggraini et al., 2020). Akuntansi sektor publik mencakup berbagai lembaga, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga yayasan, partai politik, dan institusi pendidikan (Gurendrawati et al., 2024). Salah satu instansi penting adalah Sekretariat Daerah, yang berperan dalam koordinasi administrasi, perumusan kebijakan, dan pelayanan publik di tingkat daerah (Alharani.YS et al., 2023). Lebih luas, pemerintah memiliki fungsi strategis mencakup pertahanan, penegakan hukum, pengelolaan sumber daya, kebijakan ekonomi, serta distribusi keadilan sosial (Mardiasmo, 2018).

### **Tantangan Dalam Pengelolaan Anggaran**

Tantangan dalam pengelolaan anggaran mencakup berbagai hambatan yang dapat terjadi di setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga pelaporan (Kamala et al., 2025). Di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, kendala utama meliputi keterbatasan SDM yang kompeten, lemahnya koordinasi internal, dan tingginya ketergantungan pada dana transfer akibat rendahnya PAD. Selain itu, perubahan regulasi yang cepat turut menyulitkan penyesuaian kebijakan anggaran (LKIP, 2021). Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi peningkatan kapasitas aparatur, penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas, diversifikasi pendapatan daerah, serta koordinasi lintas instansi yang lebih optimal.

### **Teori Akuntabilitas Publik oleh Ellwood**

Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas publik terdiri dari empat dimensi, yaitu: (1) akuntabilitas kejujuran dan hukum (*probity and legality*), (2) akuntabilitas proses (*process accountability*), (3) akuntabilitas program (*program accountability*), dan (4) akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). Teori ini menjadi kerangka analisis penting dalam menilai kualitas pertanggungjawaban lembaga publik, termasuk dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

### **Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran**

Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran mencerminkan tanggung jawab instansi pemerintah dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara tepat waktu dan transparan (Fransisca et al., 2021). Transparansi mendukung penyediaan informasi anggaran yang

terbuka kepada publik sehingga memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan mendorong pengelolaan yang lebih bertanggung jawab (Arisandy et al., 2022). Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 mempertegas kewajiban seluruh perangkat daerah, termasuk Sekretariat Daerah, untuk mengelola anggaran secara tertib, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini, akuntansi sektor publik berperan penting sebagai alat pengendalian dan perencanaan sebagai upaya untuk memperkuat sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

## **METODE**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. Penelitian dilaksanakan pada bulan April hingga Juni 2025 dengan lokasi penelitian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui sesi wawancara intensif dengan pihak-pihak yang dianggap relevan yang berperan langsung dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, dilakukan studi dokumentasi terhadap laporan anggaran, dokumen perencanaan, serta evaluasi kinerja keuangan. Observasi lapangan juga dilakukan untuk memperoleh gambaran praktik langsung pengelolaan anggaran.

Dalam analisis data, peneliti memanfaatkan bantuan perangkat lunak NVivo 12 untuk mengelola dan memetakan temuan kualitatif yang didapatkan dari hasil interaksi verbal dengan narasumber. Penggunaan NVivo 12 membantu peneliti dalam melakukan mengkodekan pengumpulan data secara terencana dan terstruktur, mengidentifikasi kata kunci yang sering muncul, serta mengelompokkan tema-tema utama yang sesuai dengan fokus penelitian. Proses ini memperkuat analisis tematik dan meningkatkan akurasi interpretasi data.

Validitas data diuji melalui triangulasi terhadap berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Tahapan analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sesuai dengan yang diusulkan oleh Miles dan Huberman (1994) dalam Sugiyono (2020). Fokus analisis diarahkan pada identifikasi praktik akuntabilitas dan transparansi, serta hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan lapangan, dan analisis dokumen, ditemukan bahwa pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang telah berpedoman berdasarkan ketentuan hukum yang sedang berlaku, khususnya mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dokumen pertanggungjawaban seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun secara rutin. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas penegakan prinsip akuntabel dan transparan dalam pengelolaan.

### **Proses pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang**

Untuk mendukung analisis data kualitatif secara sistematis, peneliti menggunakan perangkat lunak NVivo 12. Aplikasi ini membantu dalam proses pengkodean, pengorganisasian tema, serta pemetaan kata kunci yang dominan dalam wawancara. Melalui fitur analisis teks dan visualisasi data, NVivo 12 memudahkan identifikasi struktur dan keterkaitan antara masing-masing kategori, dengan demikian interpretasi hasil semakin objektif dan terstruktur dan juga memperkuat validitas temuan penelitian.









- a. Proses pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang telah mengikuti prosedur yang ditetapkan, dimulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Proses anggaran dengan mengacu pada regulasi yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan hambatan seperti keterlambatan pelaporan dan belum optimalnya sistem informasi keuangan yang terintegrasi.
- b. Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran telah diterapkan melalui mekanisme pelaporan, SOP yang tertulis, serta evaluasi kinerja secara berkala. Akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan rutin seperti LKIP, LPPD, dan LKPJ, serta pengawasan internal dan eksternal, termasuk evaluasi Inspektorat dan DPRD. Akuntabilitas ini tercermin dalam pelaksanaan tugas yang didasarkan pada aturan yang berlaku, namun masih perlu diperkuat terutama dalam hal peningkatan kapasitas SDM dan konsistensi pelaporan yang tepat waktu.
- c. Transparansi pengelolaan anggaran juga telah diupayakan melalui publikasi informasi dan keterbukaan akses, baik melalui laporan keuangan maupun kanal digital seperti situs resmi pemerintah. Meski demikian, informasi yang disajikan belum sepenuhnya lengkap, terstruktur, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga masih perlu ditingkatkan dalam bentuk penyajian visual seperti infografis dan media interaktif.
- d. Tantangan utama dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya integrasi sistem informasi, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan lemahnya koordinasi antar unit kerja. Selain itu, partisipasi masyarakat masih rendah dan belum semua informasi anggaran disampaikan secara terbuka dan rinci.

Secara keseluruhan, penerapan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang berjalan cukup baik, tercermin dari upaya pelaporan keuangan dan evaluasi kinerja yang sesuai prosedur. Namun, masih diperlukan sejumlah perbaikan, terutama dalam pengembangan kompetensi aparatur dengan program pengembangan keterampilan rutin serta peningkatan pemahaman terhadap sistem keuangan berbasis digital. Selain itu, optimalisasi teknologi informasi juga penting dilakukan, mengingat masih adanya hambatan berupa ketidakstabilan jaringan internet serta dan kurangnya integrasi sistem informasi antar bagian.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, mulai dari proses pelaksanaan yang kompleks, keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), hingga kendala teknologi. Peneliti merumuskan saran berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai tantangan yang muncul selama proses penelitian. Setelah mengidentifikasi permasalahan utama, peneliti kemudian menelusuri literatur yang relevan sebagai landasan teoritis dan pembanding. Melalui proses tersebut, peneliti mengembangkan gagasan serta strategi yang dianggap paling tepat dan aplikatif untuk menjawab tantangan tersebut. Berikut adalah saran dan langkah perbaikan dari hasil penelitian :

- a. Kemampuan pegawai dalam memahami dan menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi masih perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi hal ini, sekretariat daerah sebaiknya mengadakan pelatihan secara rutin dan menyediakan panduan kerja yang jelas, sehingga pegawai bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai aturan. Sejalan dengan penelitian Apriani (2024), yang mengatakan pelatihan SAKIP bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan dalam perencanaan, serta evaluasi kinerja SAKIP, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas pegawai.
- b. Penggunaan sistem informasi seperti SIPD masih perlu ditingkatkan. Internet yang sering bermasalah dan kurangnya pelatihan membuat pekerjaan jadi lambat. Maka dari itu, jaringan internet harus ditingkatkan, dan para pegawai perlu dilatih secara berkala agar mereka tidak kesulitan dalam menggunakan aplikasi. Saran ini sejalan dengan temuan dari Warsyena & Wibisono (2024) yang menyatakan guna mengatasi berbagai hambatan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan pertahanan perlu mengambil langkah strategis, antara lain dengan meningkatkan

- kompetensi aparatur melalui program program pelatihan yang terstruktur dan terus-menerus, dan juga memperkuat sarana dan prasarana teknologi informasi yang menunjang kelancaran operasional sistem SIPD RI.
- c. Keterlibatan publik dalam tahapan perencanaan dan pengawasan anggaran masih kurang. Untuk mengatasinya, pemerintah daerah bisa membuka forum atau diskusi publik secara berkala, serta menyediakan akses informasi anggaran yang mudah dipahami oleh masyarakat melalui media digital maupun papan pengumuman. Menurut Nurakhmadi et al., (2024), untuk mengatasi kendala partisipasi masyarakat, proses partisipasi dapat mencakup pengumpulan aspirasi masyarakat melalui forum komunitas, atau media daring, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan anggaran.
  - d. Untuk meningkatkan transparansi, informasi anggaran harus disampaikan secara jelas dan mudah dipahami masyarakat. Website dan media sosial resmi milik pemerintah harus diperbarui secara rutin, dengan menyajikan informasi seperti rincian anggaran, laporan kegiatan, dan rencana kerja pemerintah dalam bentuk yang menarik, misalnya infografis atau video singkat. Berdasarkan temuan penelitian Kornitasari (2023), penggunaan media visual seperti Canva terbukti menjadi metode yang efektif dalam menyampaikan informasi keuangan secara lebih ringkas, komunikatif, dan menarik.
  - e. Untuk mengatasi kurangnya komunikasi antar bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, diperlukan protokol komunikasi yang jelas, rapat koordinasi rutin, dan pemanfaatan platform digital seperti email dinas. Pembentukan tim lintas bidang dan peningkatan pemahaman tugas antar unit juga penting agar kerja sama lebih efektif dan terarah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alharani, Y.S., T. A., Hasanah, S. N., Pertiwi, S. I., & Harahap, I. (2023). Analisis Peran Sekretariat Daerah dalam Pengelolaan Surat pada Kantor Wali Kota Medan. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 6(1), 65–77. <https://doi.org/10.46576/bn.v6i1.3386>
- Anggraini, A. M., Sari, R. M., & Fristiani, N. (2020). Implementasi Metode Balanced Scorecard sebagai Tolok Ukur Pengukuran Kinerja pada Organisasi Sektor Publik. *Jca (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 1(2), 58. <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v1i2.1399>
- Apriani. (2024). Efektivitas Pelatihan Aparatur Sipil Negara terhadap Peningkatan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintahan Kabupaten Kaimana. *Jurnal Sosial Humaniora*, 1(2), 155–168. <https://doi.org/10.70214/4sgk0p11>
- Arisandy, D., Paramita, R. W. D., & Ermawati, E. (2022). Influence of Accountability and Transparency on Budget Performance With the Concept of Value For Money in The Lumajang District Government. *International Journal of Accounting and Management Research*, 3(2), 28–36. <https://doi.org/10.30741/ijamr.v3i2.1153>
- Dinkes. (2021). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. *Dialog*, 44(1), i–Vi.
- Dr. Ety Gurendrawati, M.Si., Ak., CA., Prof. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E., M.Si., Ak., CA., Hera Khairunnisa, S.E., M.Ak., Gentiga Muhammad Zairin, S.E., M.Ak., CA., CPSAK., A. C. (2024). *Akuntansi Sektor Publik*. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=ITUVEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=etty+sektor+publik&ots=-h2sdbstnt&sig=B-bSOZZnl-ucorNyPhdZOcXTeu4&redir\\_esc=y#v=onepage&q=etty sektor publik&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=ITUVEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=etty+sektor+publik&ots=-h2sdbstnt&sig=B-bSOZZnl-ucorNyPhdZOcXTeu4&redir_esc=y#v=onepage&q=etty sektor publik&f=false)
- Dwi S, A., Indarti, S., & Patrisia, N. E. (2020). Penerapan Responsibilitas dan Transparansi Layanan Publik (Sebuah Kajian Ilmu Administrasi). *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 7(1), 43–48. <https://doi.org/10.37676/professional.v7i1.1091>
- Fransisca, F., Saiful, S., & Aprilia, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Fairness*, 8(3), 171–182. <https://doi.org/10.33369/fairness.v8i3.15207>
- Kamala, J., Salsa, S. A., Nurilawati, & Pangestoeti, W. (2025). Analisis Tantangan dan Solusi dalam Anggaran Belanja Daerah | Nusantara Journal of Multidisciplinary Science. *Fakultas Ilmu*

- Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, Indonesia*, 2(6), 1282–1286. <https://jurnal.intekom.id/index.php/njms/article/view/1037>
- Kornitasari, Y. (2023). Sosialisasi Laporan Keuangan PMI Kabupaten Blitar: Transparan, Akuntabel dan Kepercayaan Publik. *Empowerment*, 6(03), 288–296. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i03.8742>
- Maolani, D. Y. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 3. <http://jurnaldialektika.com/>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=pBVCEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=mardiasmo+akuntansi+sektor+publik&ots=z6upWv4iGz&sig=kNJCAGEs8ZkFwVcG9TIThLkN9Ag&redir\\_esc=y#v=onepage&q=mardiasmo+akuntansi+sektor+publik&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=pBVCEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=mardiasmo+akuntansi+sektor+publik&ots=z6upWv4iGz&sig=kNJCAGEs8ZkFwVcG9TIThLkN9Ag&redir_esc=y#v=onepage&q=mardiasmo+akuntansi+sektor+publik&f=false)
- Nashihah, D., Rachman, R. A., Binada, U., Nastiti, B., & Yulitasari, L. D. (2023). Strategi Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Malang. *Pangripta*, 6(1), 1138–1147. <https://doi.org/10.58411/txft8218>
- Naufal, M. M., Syafina, L., Studi, P., Syariah, A., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). Penerapan Sistem Akuntabilitas dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kinerja Instansi Sekretariat Daerah Kantor Bupati Deli Serdang. 3(4), 266–273. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i4.3277>
- Nurakhmadi, D. A., Rahmawan, T. I., & Suhendro, S. (2024). Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 48–62. <https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.173>
- Pupuh S Wijaya. (2023). Dengan SAKIP Satu Rupiah Anggaran Dipertanggungjawabkan. Sumedangkab.Go.Id. <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/dengan-sakip-satu-rupiah-anggaran-dipertanggungjawabkan>
- Qak, M., & Holifah, N. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan di Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 4(1), 49–59. <https://doi.org/10.38156/jisp.v4i1.226>
- Setyowati, E. D., Wulandari, P., Yantino, A., & Narastri, M. (2021). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Surabaya : Sebuah Tinjauan Teoritis. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 6(1), 17–28. <https://doi.org/10.30996/jea17.v6i1.5220>
- Sudrajat, A. R. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Publik Bagaimana Pengaruh terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 395–402.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (M. Dr. Ir. Sutopo. S.Pd (ed.); Cetakan Ke). Alfabeta, cv.
- Warsyena, R., & Wibisono. (2024). Analisis Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (Sipd Ri) untuk Penatausahaan Keuangan di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Analysis. *Triwahyuni, Fitria Fatmawati, Yuli*, 4(5), 58–71.
- Wibowo, A. T., & Susliyanti, E. D. (2024). Pengaruh Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan terhadap Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 4(2), 67–76. <https://doi.org/10.55587/jla.v4i2.116>
- Widianto, A. W., Kuntadi, C., Karunia, R. L., & Widianto<sup>1</sup>, A. W. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Anggaran: Standar Operasional Prosedur (SOP) Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pimpinan. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Logistik*, 2(3), 1361–1371. [www.ckpublisher.co.id](http://www.ckpublisher.co.id)